



Pengendalian Keuangan Internal Lemah Sumber Temuan Audit BPK

MEMPAWAH. Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana mengakui, sering terjadi kontradiksi atau multitafsir antara kenyataan yang ada dan yang seharusnya dilaporkan, serta yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Akibatnya, saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit dianggap sebagai temuan penyimpangan keuangan daerah.

Agar kesalahan tersebut tidak terus menerus terjadi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Kalimantan Barat menggelar Sosialisasi Pengurusan dan Penghapusan Piutang Negara/Piutang Daerah, Kamis (25/9) di Aula Kantor Bupati Mempawah. Sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Bidang Piutang Negara DJKN Kalimantan Barat, Prastowo Subagyo. "Permasalahan yang kerap muncul dalam pengelolaan keuangan daerah ketika diaudit BPK, yakni lemahnya sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku," ungkap Ramlana saat membuka sosialisasi.

Menurut dia, hal itu dikarenakan belum dipahaminya secara utuh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akibatnya, dalam pelaksanaan sering terjadi kontradiksi atau multitafsir antara kenyataan yang ada dan yang seharusnya dilaporkan, serta diungkap dalam laporan keuangan. "Karenanya kami menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Sebab, melalui sosialisasi ini akan diberikan edukasi dan penguatan sumber daya manusia, sehingga meningkatkan kemampuan pejabat dan staf yang diberi kewenangan pengelolaan keuangan," tuturnya.

Ia berharap, sosialisasi ini dapat menciptakan komitmen yang tinggi terhadap bagaimana seharusnya penyelesaian piutang negara/piutang daerah yang mungkin terdapat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mempawah. "Kondisi itu diharapkan mampu menciptakan kesamaan persepsi dalam mewujudkan upaya pengelolaan keuangan



Sosialisasi Pengurusan dan Penghapusan Piutang Negara/Piutang Daerah digelar di Aula Kantor Bupati Mempawah, Kamis (25/9). *Ari Setiawan*

dan peningkatan pemahaman terhadap pengurusan aset pemerintah daerah, diantaranya investasi dan piutang daerah," ujarnya.

Dengan komitmen seluruh kepala SKPD, Ramlana menambahkan, ke depan

tidak terjadi lagi inkonsistensi dalam pencatatan dan penyajian dalam laporan keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). "Semoga momentum ini mampu men-

bangun komunikasi yang baik antara SKPD selaku entitas akuntansi, PPKD selaku entitas pelaporan keuangan, dan DJKN yang berwenang dalam pengurusan piutang negara/piutang daerah," tukasnya. (fia)